

## **Orientasi Politik Aktivistis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan**

### **Political Orientation of the Former Hizbut Tahrir Indonesia Activists After Being Dissolved**

**Zulfadli**

Universitas Andalas, Indonesia

Jl. Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

zulfadli@soc.unand.ac.id

**Abstrak:** Artikel ini ingin mengetahui orientasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah dibubarkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah (Perpu) No 2 tahun 2017, sebagai pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Orientasi politik merupakan sikap yang dimiliki seorang individu maupun kelompok dalam interaksinya dengan kehidupan politik yang meliputi, sikap, nilai dan perilaku politik Pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi HTI. Pencabutan status badan hukum HTI dilatar belakangi karena ideologi dan aktivitas yang dilakukan oleh HTI bertentangan dengan Pancasila dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah organisasi sosial-keagamaan keberadaan Hizbut Tahrir sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. HTI memiliki struktur anggota, kaderisasi, aktivis, simpatisan yang cukup solid dan konsisten memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, ketika organisasi mereka dibubarkan oleh pemerintah, anggota, kader, aktivis, dan simpatisan eks HTI, ke arah manakah orientasi politiknya setelah dibubarkan. Pertanyaan penelitian ini ingin menjawab kemanakah orientasi politik eks Hizbut Tahrir setelah dibubarkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengetahui dan membandingkan kearah mana orientasi politiknya dengan gerakan islamis lainnya yang pernah dibubarkan oleh pemerintah pada masa-masa sebelumnya.

**Kata Kunci:** Orientasi Politik, Hizbut Tahrir Indonesia, Perpu

**Abstract:** This article explains the political orientation of Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) after it was dissolved by the government through government regulation (Perpu) No. 2 of 2017, substitute ordinance No. 17 of 2013 about Community Organizations. The government through the Ministry of Law and Human Rights revoked the legal status of the HTI organization. The revocation of the legal status of HTI is motivated by the ideology and activities carried out by HTI in conflict with the Pancasila and the unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI). As a socio-religious organization the existence of Hizbut-Tahrir has been going on for a long time in Indonesia. HTI has a fairly solid member structure, regeneration, activists, sympathizers and, fight for the Islamic Khilafah. Therefore, when their organization was dissolved by the government, members, cadres, activists, and sympathizers of the former HTI, in what direction was their political orientation after it was dissolved. Political orientation is the attitude of an individual or group

in their interactions with political life which includes political attitudes, values and, behavior. This research question wants to answer where the political orientation of the former Hizbut-Tahrir was after it was dissolved by the government. The aim is to find out and compare the direction of political orientation with other Islamic movements that have been dissolved by the government in previous periods.

**Keywords:** Political Orientation, Hizbut Tahrir Indonesia, Government Regulation

## **Pendahuluan**

Orientasi politik merupakan salah aspek yang sangat penting dalam negara demokrasi. Elemen-elemen aktor dan pendukung demokrasi seperti individu, organisasi masyarakat, partai politik, kelompok kepentingan, kelas menengah, buruh, aktivis, masyarakat sipil, para intelektual, tokoh agama, elit politik, mempunyai orientasi politik dalam bentuk keterlibatan mereka dalam proses politik. Ramlan Surbakti (1992) Orientasi politik merupakan sikap yang dimiliki seorang individu maupun kelompok dalam interaksinya dengan kehidupan politik yang meliputi sikap, nilai dan perilaku politik. Dalam kajian sistem politik Indonesia bahwa orientasi politik merupakan salah satu aspek dari partisipasi politik masyarakat. Meskipun berbeda akan tetapi orientasi politik dan partisipasi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

HTI termasuk salah satu gerakan Islam politik yang terdapat di Indonesia yang memiliki orientasi politik dalam memperjuangkan khilafah Islamiyah. Berdasarkan ideologi yang diperjuangkan, aktivitas yang dilakukan, aktor yang terlibat yang terdiri anggota, kader, bahwa HTI termasuk organisasi yang konsisten menegakkan cita-cita khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah adalah bentuk sistem pemerintahan ideal yang cita-citakan oleh kelompok HTI.<sup>2</sup> HTI dikenal tidak saja mencita-citakan ingin memperjuangkan syari'at Islam dalam negara tapi juga ingin menyatukan negara-negara Islam dibawah panji-panji khilafah. Selain itu kelompok HTI termasuk radikal dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, karena ingin mengganti sistem yang berlaku disuatu negara dengan sistem khilafah. HTI menolak Barat, kapitalisme, liberalisme dan pluralisme. Selain itu, HTI juga menolak terorisme dan meyebarkan gagasannya melalui cara-cara non kekerasan (*non violence extremists*), yang berbeda dengan ormas lainnya seperti HTI yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan.<sup>3</sup> Meskipun demikian tetap saja ada yang meragukan dan bahkan mengawatirkan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan oleh HTI sebenarnya syarat

dengan gerakan politik yang dibungkus atas nama dakwah. Oleh karena itu aktivitas yang dilakukan oleh HTI lebih tepat disebut radikal Islam tanpa kekerasan.<sup>4</sup>

HTI melakukan strategi dakwah yang berbeda dengan ormas lainnya dengan cara membentuk opini public umat Islam, melalui demonstrasi, konferensi khilafah, dan mereka lebih suka menyebutkan gerakan yang dilakukannya adalah gerakan dakwah ketimbang gerakan politik.<sup>5</sup>

Era reformasi merupakan momentum bagi HTI melakukan transformasi organisasi dari gerakan dakwah bawah tanah secara tersembunyi menjadi organisasi yang legal-formal secara terbuka. Keterbukaan peluang politik pada era reformasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan organisasi HTI setelah reformasi. Karena mereka menolak demokrasi dan Negara bangsa, maka aktivitas yang dilakukan HTI mengakibatkan dampak negatif terhadap penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia.<sup>6</sup>Selain itu, era reformasi merupakan peluang politik dalam melakukan mobilisasi struktur baik internal maupun eksternal dan melakukan proses framing gerakan atas nama ummah.<sup>7</sup>

HTI merupakan salah satu organisasi yang sudah berada cukup lama di Indonesia. Meskipun ia bagian dari jaringan organisasi transnasional yang didirikan oleh Taqiyuddin an Nabhani pada tahun 1952 di Jerussalem. Karena ideologi yang diusung oleh HTI adalah ingin mendirikan khilafat Islamiyah, sehingga dia menjadi Gerakan politik yang berkembang lintas negara, hingga sampai ke Indonesia. HTI mula masuk ke Indonesia melalui Mustafa dan Abdurrahman al Bagdadi. Karena mereka pernah terlibat dalam aktivitas HTI di Yordania dan menggangu Taqiyuddin an Nabhani, sehingga ia mulai menyebarkan pemikiran-pemikiran HTI di Indonesia. Aktivitas mereka seputar pemikiran Islam, Aqidah Islam, syari'ah, Akhlak dengan sistem khilafah.<sup>8</sup>

Menurut Hilmy (2015)<sup>9</sup> HTI termasuk salah satu organisasi transnasional yang memiliki ciri khas tersendiri yang mencakup tiga hal yaitu (1) pergerakan demografis, yaitu adanya mobilitas yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dari satu negara ke Negara lainnya. (2) lembaga keagamaan transnasional, yaitu sejauhmana mana peran jejaring organisasi atau lembaga yang terdapat dalam suatu Negara hubungannya dengan Negara lainnya. (3) perpindahan gagasan atau ide yaitu yang menekankan pada tranformasi gagasan dari individu atau sekelompok individu di suatu Negara/tempat untuk melakukan tranformasi pengetahuan ke individu di suatu Negara/tempat lainnya.

Pola yang terakhir ini merupakan modus yang cukup sulit dibendung karena disebarakan melalui teknonologi informasi dibawah kekuatan globalisasi.

Houriya Ahmed dan Hannah Stuart (2009) bahwa HTI memiliki ideology dan strategi gerakan yang sebagai partai politik yang revolusioner dalam mendirikan khilafah islamiyah yang disatukan atas ikatan ummah. Sehingga ia memilik strategi, agende dan taktik, ideology yang berbeda-beda dimasing-masing Negara. Baik itu aktivitasnya dalam Negara mayoritas muslim (Timur Tengah) dan Negara minoritas muslim (Barat).<sup>10</sup>

Organisasi HTI melakukan mobilisasi terhadap masyarakat dalam mencita-citakan berdirinya khilafah islamiyah. Sehingga banyak diantara anggota masyarakat, bahkan termasuk publik figure, pemimpin muslim, politisi, pemimimpin militer, journalist dan para pelayan pemerintah (PNS) tersusupi oleh ideology khilafah HTI. Stategi mobilisasi dalam mengiginkan berdirinya khilafah islamiyah, dimulai dengan cara memikirkan kembali konsep ummah sebagai perekat dalam mempersatukan umat Islam. Tidak bersatunya Negara-negara Islam karena ummah sebagai identitas politik umat Islam sudah ditinggalkan. Seiring dengan munculnya gagasan *nation-state* dan *nation identity* yang berasal dari Barat. Padahal konsep ummah merupakan cara menyatukan umat Islam dalam mempersatukan ummah secara global dibawah naungan khilafah islamiyah.<sup>11</sup> Sebagai implikasi dari konsep khilafah yang dikembangkan oleh HTI struktur dan anggota HTI lebih banyak diterima dikalangan generasi muda teruta diperguruan tinggi. Ide khilafah yang dicita-citakan lebih mudah diterima dikalangan anak-anak muda yang mengiginkan terjadinya perubahan secara radikal. Di kampus organisasi sayap kanan HTI dikenal juga dengan Gema Pembebasan dimana aktivitas, ideology, dan cita-cita yang diperjuangkan sama dengan HTI. Kalangan anak-anak muda yang terdapat dikampus merupakan strategi mobilisasi sumber daya manusia yang sangat potensial dalam mengembangkan gerakan HTI. Mereka melakukan penjaringan melalui sistem sel yang dikenal dengan fikrah dan didukung juga oleh oleh media online dan cetak dan sumber-sumber digital yang kuat. Seperti <http://www.hizbut-tahrir.or.id/>, Bulletin Al-Islam, Majalah Al-Wa'ie, dan video yang berisikan tentang khilafah islamiyah.<sup>12</sup> Situs-situs tersebut lebih banyak diakses oleh kalangan anak muda. Mereka juga menyebarkan media tersebut melalui masjid-mesjid, sekolah dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Pemerintah beberapa waktu lalu membubarkan organisasi HTI karena bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orientasi politik HTI dalam mencita-citakan khilafah Islamiyah dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.<sup>14</sup> Islam politik gejala sosial politik dibelahan dunia muslim yang berkaitan dengan aktivitas sekelompok individu dengan landasan ideologi yang diyakini bersama. Dalam melihat Islam politik terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan. (1) Aktor yang terlibat, (2), Aktivisme (3), Ideologi.<sup>15</sup> Sementara Islam kultural adalah gerakan yang lebih mengedepankan Islam sebagai landasan etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti NU dan Muhammadiyah.

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 2013. Pembubaran organisasi HTI menuai polemik dan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Kebijakan Negara terhadap keberadaan HTI berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Ada tiga bentuk kebijakan yang diambil oleh Negara terhadap HTI. (1) mengakui HTI sebagai organisasi legal/resmi. (2). Tidak mengakuinya dan juga tidak melarangnya. (3) Melarang aktivitas dan ideologi HTI.<sup>16</sup>

Kebijakan terhadap HTI yang terjadi di Indonesia termasuk dalam bentuk yang ketiga yaitu melarang. Dalam hal ini bagi kalangan yang mendukung dikeluarkan Perpu, pemerintah menyampaikan bahwa alasan dikeluarkannya perpu ormas anti Pancasila dengan alasan Pertama dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tidak dijelaskan secara lebih detail mana saja organisasi atau paham-paham, ideologi, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua perpu ini diharapkan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mendesak supaya ada kepastian hukum secara tepat. Ketiga karena belum diatur secara lebih jelas dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 yang mengatur secara lebih detil terkait organisasi anti Pancasila, dikarenakan membuat Undang-Undang baru membutuhkan waktu yang cukup lama maka dikeluarkan perpu No 17 Tahun 2017.

Sementara bagi kalangan yang kontra menilai Perpu No 2 tahun 2017 syarat dengan unsur cacat hukum. Karena tidak terdapat adanya kondisi kegentingan yang memaksa sehingga dikerluarkan suatu Perpu dan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah tidak cukup kuat. Dibutuhkan indikator-indikator yang kongkret dalam menilai suatu ormas dianggap bertentangan dengan Pancasila, karena batasan tersebut

menjadi kabur, sehingga sangat subjektif-politis sekali alasan dibalik pembubaran suatu ormas.<sup>17</sup>

Alhasil pemerintah membubarkan organisasi HTI dengan alasan (1) HTI tidak melaksanakan peran positif dan turut bagian dalam proses pembangunan dan mencapai tujuan nasional. (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat bertentangan dengan prinsip, asas, tujuan, dasar dan ciri yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (3) Aktivitas yang dilakukan oleh HTI berbenturan dengan masyarakat dan bisa mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan ketutuhan NKRI.

Sebagai sebuah organisasi yang berbasis kepada ideologi Islam dengan tujuan utama ingin mendirikan cita-cita khilafah islamiya, HTI bukanlah organisasi pertama yang pernah dibubarkan oleh pemerintah dalam perjalanan sejarah. Karena dalam perjalanan sejarah bahwasanya hubungan antara kelompok islamis dan negara tidak selalu harmonis dan akomodatif, akan tetapi juga hubungan yang antagonistik.<sup>18</sup> Hubungan keduanya penuh dinamika bahkan laksana kisah antagonisme dan kecurigaan satu sama lainnya. Perbedaan pandangan antara kelompok islamis dan nasionalis dalam merumuskan dasar negara Indonesia adalah babakan awal relasi yang saling curiga tersebut. Kelompok islamis menginginkan Indonesia menjadi negara Islam pada satu sisi, sementara kelompok nasionalisme menginginkan Indonesia menjadi negara demokrasi Pancasila. Meskipun kedua kelompok ini pada akhirnya melakukan kompromi politik, tetap saja masih ada anggapan bahwa kelompok islamis diam-diam ingin mengganti lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi ideologi Islam. Pada masa setelah revolusi kemerdekaan ideologi yang ingin kembali mendirikan negara Islam juga munculkan kembali dalam bentuk pemberontakan Darul Islam Indonesia (DII), Tentara Islam Indonesia (TII), dan sejumlah aktivisnya yang bergabung dalam kelompok jama'ah Islamiyah.<sup>19</sup>

Meskipun pemberontakan itu dapat diberantas oleh pemerintahan orde lama, cita-cita mendirikan negara Islam juga muncul kembali dalam sidang-sidang majelis konstituante pada tahun 1950-an. Hingga pada akhirnya Soekarno membubarkan mejelis konstituante dan mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak saat itu, keinginan untuk mendirikan negara Islam kembali pupus.<sup>20</sup>

Pertanyaan penelitian (*riset quotion*) dalam artikel ini mengetahui bagaimana orientasi politik eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah melalui Perpu No 2 Tahun 2017

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembubaran HTI. Data dikumpulkan melalui buku, jurnal, pemberitaan di media massa. Untuk mengetahui orientasi politik HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah, penulis mencoba membandingkan pembubaran HTI dengan kisah pembubaran organisasi Islam politik lainnya dalam sejarah politik Indonesia. Penulis mencoba memotret orientasi politik HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah terutama yang terdapat di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi yang dijadikan sampel adalah Universitas Andalas Padang dan UIN Imam Bonjol Padang.

## **Sejarah Pembubaran Organisasi Islam Politik di Indonesia**

### **1. Organisasi Sarekat Islam**

Islam politik dibawah pemerintahan Belanda mengalami tekanan yang cukup besar. Sebab pemerintah Belanda berusaha menekan gerakan-gerakan Islam politik karena dianggap mengancam pemerintahan Hindia-Belanda. Ancaman tersebut tidak saja datang dari kelompok Islam, tapi juga kelompok nasionalis yang nota bene dibesarkan dalam tradisi pendidikan Barat. Adalah Christian Snouck Hurgronje membuat kategorisasi terhadap kelompok Islam pada waktu itu. Snuck Hugronje sengaja diangkat oleh pemerintahan Belanda untuk menyelesaikan pertentangan antara kelompok Islam politik dan pemerintahan Belanda. Menurut Harry J Benda bahwa pada abad ke-19 para santri yang terdapat dipedalaman Jawa sudah melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Selain perlawanan yang dilakukan oleh kaum santri tersebut, sesungguhnya di beberapa daerah juga sudah terjadi perang yang dilakukan oleh kelompok Islam terhadap Belanda. Seperti perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903). Oleh karena itu pemerintahan Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara yang diperbaratkan (*westernized Indonesia*), bukan Indonesia Islam, bukan juga Indonesia adat.<sup>21</sup>

Dia membedakan antara Islam Politik dengan Islam ibadah atau Islam ritual. Pemerintahan Belanda membolehkan keberadaan Islam ibadah atau ritual pada satu sisi

akan tetapi mewaspadai gerakan Islam politik pada sisi lain. Sehingga bagi umat Islam yang ingin menyelenggarakan ibadah haji tidak persulit.<sup>22</sup>

Sarekat Islam adalah organisasi Islam politik yang cukup menonjol pada abad 20 dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Sareka Islam sendiri merupakan lanjutan dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang hanya berorientasi ekonomi. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya Sarekat Dagang Islam mengalami perubahan orientasi dari orientasi ekonomi menjadi menjadi organisasi sosial politik Islam pertama pada ke-20.<sup>23</sup> Perubahan ini juga tidak lepas dari pemahaman bahwasanya Islam bukan agama yang mengurus urusan ibadah atau ritual saja, akan tetapi juga harus ditransformasi ke tengah-tengah masyarakat. Perubahan ini sangat penting sekali sebagai strategi kekuatan politik terhadap pemerintahan Belanda. Selain itu juga untuk menarik simpati dari kalangan umat Islam. Kondisi ini sangat penting sekali sebagai wadah organisasi Islam untuk menyampaikan aspirasinya ke Belanda.

Namun dalam perkembangan selanjutnya sebagai sebuah organisasi sosial dan politik sarekat Islam mengalami keterpecahan seiring muncul organisasi-organisasi tandingan bentukan Belanda yang berham sosialis. Seperti Sneevlit (ISDV) (Indische Social Demokratische Vereeniging) Meskipun organisasi bentukan Belanda tersebut tidak menarik simpati dari masyarakat namun mereka berhasil melakukan perembesan (infiltrasi) ke dalam tubuh organisasi Sarekat Islam. Akibatnya sarekat Islam pecah menjadi dua yaitu Sarekat Islam merah berideologikan komunis dan Sarekat Islam putih berideologikan Islam. Sarekat Islam merah dipimpin oleh Semaun, Tan Malaka, sementara Sarekat Islam putih dipimpin oleh Agus Salim, Abdul Muis dan Cokrominoto.<sup>24</sup>

Lantas kemanakah orientasi politik Sarekat Islam setelah mengalami perpecahan ditubuh organisasinya? Dalam perkembangan selanjutnya Sarekat bermetomorfosis menjadi organisasi pergerakan seperti Central Sarekat Islam (CSI) tahun 1916, Partai Sarekat Islam (PSI) tahun 1920, Partai Sarekat Islam Hindia Bagian Timur (PSIHT), tahun 1923, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) tahun 1929, Syarikat Islam 1973, Majelis Takhim tahun 2003 diganti nama menjadi Sarekat Islam. Sejak saat kongres tersebut orientasi politik Sarekat Islam kembali ke khittahnya sebagai gerakan dakwah dan ekonomi.<sup>25</sup>



## 2. Masyumi

Kisah pembubaran organisasi Islam politik dalam sejarah Indonesia adalah partai politik Islam Indonesia yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini didirikan pada tanggal 7 November 1945 dalam revolusi sosial-politik yang sedang bergejolak dan persaingan antar berbagai golongan politik masyarakat di Indonesia. Partai Masyumi dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.<sup>26</sup>

Partai Masyumi termasuk partai terbesar umat Islam setelah revolusi kemerdekaan. Namun dalam perkembangannya partai ini mengalami keterpecahan baik dalam memperjuangkan ideologinya dan perpecahan dikalangan internal elitnya. Sehingga menjelang diadakannya pemilu pertama tahun 1955 NU yang pada awalnya menjadi bagian dari Masyumi, menjadi partai politik sendiri. Ketika diadakan pemilu pertama pada tahun 1955 meskipun terdiri dari 28 partai politik, secara ideologis dapat digolongkan kedalam tiga aliran ideologi, yaitu Islam, Marxisme/Sosialisme, dan Nasionalisme Sekuler.<sup>27</sup> Hasil pemilu tersebut tidak memuaskan semua pihak karena tidak ada partai politik yang menang dominan. Terutama PNI dan Masyumi yang punya harapan besar menang mutlak. Masyumi dan PNI hanya mendapatkan 57 kursi dalam parlemen dari jumlah total 257; NU dapat 45, PKI 39 dan partai lainnya kurang dari 10 kursi. Sebagai sebuah partai Islam ketika itu, tentu saja Masyumi memiliki sejumlah tokoh dan massa yang cukup banyak tersebar dimasyarakat.

Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 200 Tahun 1960 yang berisikan membubarkan partai politik masyumi termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-ranting diseluruh wilayah Republik Indonesia. Apa yang dialami oleh partai Masyumi ini mirip dengan pembubaran HTI. Bahkan hari waktu pelaksanaannya sama dengan pembubaran partai Masyumi dan PSI.<sup>28</sup>

Setelah presiden Soekarno membubarkan Masyumi, kemanakah orientasi politiknya? Para pengikut partai Masyumi mendirikan Keluarga Bulan Bintang untuk mengkampanyekan dakwah Islam dan hukum syari'ah. Namun dalam perjalanannya aktivitas mereka dilarang oleh pemerintah orde baru seiring dengan diberlakukannya azas tunggal. Setiap organisasi dan partai politik harus berasaskan Pancasila. Sehingga kader-kader dari partai masyumi menempuh jalur dakwah dengan mendirikan Dewan

Dakwah Islam Indonesia (DDII). Dibawah rezim orde baru wacana tentang negara Islam mulai kehilangan pamor. Namun semangat pendirian negara Islam tetap dijaga dan diperlihara yang disalurkan melalui DDII.

Dalam lembaga itu semangat wacana negara Islam tetap diperlihara. Dari politik ke jalur dakwah, itulah perubahan orientasi politik yang dilakukan oleh Masyumi setelah dibubarkan oleh pemerintah Soekarno. DDII melalui jalur dakwahnya pada masa Soeharto memfokuskan diri pada aktivitas dakwah, khutbah agama, pelatihan dikampus umum, menjalin kerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi dalam hal penerbitan, publikasi dakwah dan institusi Pendidikan, dan membentengi misi kristenisasi di Indonesia. Pada tahun 1980-an Masyumi juga menterjemahkan buku-buku karangan Sayyid Qutb, Abu a'la al Maududi.<sup>29</sup> Setelah jatuh Soeharto pada tahun 1998, para eks Masyumi dan simpatisannya mendirikan partai politik Bulan Bintang (PBB).

### **Orientasi Politik HTI Pasca Dibubarkan Pemerintah**

Pasca kejatuhan orde bermunculan banyak sekali muncul organisasi maupun partai politik yang berdasarkan pada Islam. Seperti partai PKS, PBB, PAN, PPP, PKB dan lain sebagainya. Sementara organisasi Islam yang muncul seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Salafi dan lain sebagai. Kelompok ini memiliki ideologi dan aktivitas yang berbeda dengan gerakan arus utama (mainstream) seperti yang direpresenasikan oleh NU dan Muhammadiyah. Kelompok ini dinilai puritan, konservatif, militansi yang kuat.

Euphoria reformasi merupakan momentum politik yang dimanfaatkan oleh HTI dalam menyelenggarakan konferensi internasional khilafah Islam di Istonora senayan yang hadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh HTI internasional dan diikuti oleh HTI Indonesia, serta organisasi Islam lainnya. Sehingga HTI secara resmi melaksanakan segala macam aktivitasnya secara terbuka. Sejak saat itu, HTI menjadi salah satu kekuatan Islam politik di Indonesia.

HTI termasuk kelompok yang memiliki militansi yang kuat dimana tidak hanya memperjuangkan syari'at Islam dalam bingkai negara, tapi juga mencita-citakan khilafah Islamiyah. Bahkan tidak jarang dalam memperjuangkan ideologinya berbenturan dengan kelompok Islam lainnya di tengah masyarakat. Selain itu, ideologi

yang diperjuangkan menyusup kedalam tubuh organisasi dan kelompok-kelompok gerakan lainnya.<sup>30</sup> Dalam menjalankan aktivitas dakwahnya, gerakan HTI menempatkan diri sebagai kekuatan politik oposisi yang menentang penguasa yang tidak menerapkan sistem politik yang syari'ah, islami dan menegakkan hukum Islam. Mereka juga menolak sistem politik yang berasal dari Barat, seperti nation state, nasionalisme, demokrasi, kedaulatan rakyat, trias politika dan lain sebagainya. Mereka menginginkan sistem politik yang islami dibawah panji-panji khilafah islamiyah. Meskipun HTI mengklaim gerakan mereka adalah gerakan dakwah, akan tetapi dari aktivitas yang mereka lakukan adalah gerakan politik.<sup>31</sup>

Ideologi khilafah yang dikembangkan oleh HTI tidak hanya dilarang di Indonesia tapi juga dilarang di berbagai negara. Setidaknya ada 20 negara yang melarang. Termasuk negara-negara yang penduduknya mayoritas islam. Tercatat misalnya Turki, Mesir, Arab Saudi, Malaysia, Yordania. Karena kalau diizinkan akan mengancam keberadaan nation state suatu negara. Namun ironisnya disatu sisi HTI menolak sistem demokrasi yang diterapkan disuatu negara, HTI justru berkembang di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Meskipun pemerintah sudah membubarkan HTI, akan tetapi sebagai organisasi Islam dalam bidang dakwah, sosial dan politik, tidak serta merta langsung menghilangkan aktivitas HTI. Aktivitas HTI atas nama HTI bisa dilarang oleh pemerintah, akan tetapi pemikiran, ide-ide, gagasan, ideologi tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Mereka tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa, hanya saja simbol, bendera, nomenklatur atas nama HTI sudah tidak lagi digunakan. Karena kalau aktivitasnya masih menggunakan simbol-simbol tersebut, akan ditindak langsung oleh pemerintah. Oleh karena dimasa-masa yang akan datang, keinginan untuk mencita-cita khilafah Islam masih akan terus berlanjut. Jika dulu HTI menggunakan media berupa bulletin, majalah, website dan lain sebagainya, maka setelah dibubarkan bulletin yang pada prinsipnya sama dengan bulletin Al-Islam HTI masih banyak tersebar luas di masyarakat. Saat ini bulletin yang tersebar dimasyarakat adalah bulletin Kaffah.<sup>32</sup> Diduga bulletin ini merupakan metamorphosis dari bulletin Al-Islam milik HTI sebelumnya. Meski disebar dalam lingkup yang terbatas, pola penyebarannya sama seperti bulletin Al-Islam, yang dibagikan pada setiap hari juma'at, dengan fokus sasaran masjid kampus dan sekolah-sekolah menengah umum. Tema, isi (*content*), gaya penulisan cenderung sama dengan bulletin Al-Islam yang mengedepankan kritik

terhadap sistem pemerintahan, ideologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai asing dan memberikan alternative dalam pandangan hidup islami (*nizhamul islami*).<sup>33</sup>

### **Potret Orientasi Politik Eks HTI di Perguruan Tinggi**

HTI memiliki kader, anggota, pengurus, simpatisan yang cukup kuat diperguruan tinggi. Bagian ini akan melihat potret orientasi politik Eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun tidak bisa diketahui secara pasti berapa jumlah sesungguhnya anggota HTI, namun bisa diperkirakan massa HTI di Kota Padang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat setiap aksi yang mereka lakukan dalam melakukan demonstrasi dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti beberapa aksi yang mereka lakukan adalah, aksi save palestina, penolakan terhadap rumah sakit Siloam Internasional di Kota Padang, dan aksi menolak liberalisme terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh asing dan aksi dalam menolak sistem demokrasi dan mengganti dengan sisatem khilafah Islamiyah.<sup>34</sup>

Data dari situs resmi HTI pada tahun 2013 hingga awal 2016, sudah puluhan kali gerakan ini mengritik tajam fenomena buruk diakibatkan oleh demokrasi,. Kasus yang menghangat pada tahun 2015 yakni tentang pemilukada serentak, dapat ditemukan beberapa pernyataan dari anasir-anasir HTI yang memang dalam pengamatan dan pengalaman penulis, HTI selalu melakukan kritikan tajam terhadap pesta demokrasi tersebut.

HTI dapat dipastikan tidak akan ikut berkontribusi dalam pemilu, tapi mereka tidak mau disebut menggembosi penyelenggaraan pemilu. Mereka mengharapkan, adanya perubahan kepemimpinan, namun juga adanya perubahan sistem politik pemerintahan, yakni perubahan menuju khilafah. Selain itu HT juga menyinggung masalah golput yang isinya dianggap sebagai pembelaan diri dari keengganan untuk menyoblos, sekaligus lahan promosi ide anti-demokrasi. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus dihapus dengan sistem penegakan syari'at Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

Selanjutnya pada suatu kegiatan yang juga dimuat di situs HTI, dalam perhelatan pilkada serentak tahun 2015 mereka menyerukan seluruh komponen bangsa untuk menolak demokrasi. Karena sistem demokrasi yang telah dijalankan selama puluhan tahun di Indonesia telah nyata gagal membawa kesejahteraan yang hakiki bagi

rakyatnya. Baginya, pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi hanya berhasil mengganti rezim penguasa saja, sementara sistemnya tidak berubah, maka perubahan yang hakiki mustahil terwujud yang hanya bisa dilakukan melalui penegakan syari'at Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah.<sup>35</sup>

Pada tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut UU Ormas. Beberapa waktu lalu, UU tersebut diganti dengan peraturan pemerintah No 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dengan berbagai pertimbangan dan peningkatan demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan, terutama menyangkut pelaksanaan demokrasi pancasila.

Selanjutnya Organisasi masyarakat yang telah diatur dalam Perpu No 2 Tahun 2017, di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu:

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bahwa ormas berasaskan tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas akan tetapi tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-undang Dasar negara. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana yang dapat di pahami dari Perpu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka pengertian Ormas tersebut dimaksudkan untuk mewadahi semua organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang dibentuk dengan tiga pilar dasar, yaitu kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia dan meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh

lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Berdasarkan Perpu No 2 Tahun 2017, pemerintah secara resmi membubarkan HTI dengan beberapa pertimbangan. (1) Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. (2) aktivitas yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. (3) Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Hizbut Tahrir merupakan salah satu ormas transnasionalisme Islam yang baru saja dibubarkan oleh pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HT.

Setelah dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Perpu No 2 Tahun 2017, kemana arah orientasi politik islamis Aktivis HTI. Diasumsikan apakah gerakan atau orientasi politik HTI bergabung dengan ormas yang ada dan hanya menjadi gerakan dakwah, atau berafiliasi dengan salah satu partai politik atau justru ingin mendirikan partai politik baru, dan beberapa asumsi alternatif lainnya.

HTI dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Meskipun HTI melakukan banding terhadap keputusan pemerintah dalam membubarkan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namaun PTUN menolak gugatan yang diajukan ditolak secara keseluruhan. Majelis hakim menilai tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 yang digunakan untuk membubarkan HTI.

HTI disebut hakim terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah, lewat berbagai rekaman, salah satunya adalah ikrar ribuan mahasiswa Intitut

Pertanian Bogor, Maret 2016 yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat. Pemerintah tidak mengajak HTI berdiskusi sebelum dibubarkan karena tindakan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah kondisi yang luar biasa sehingga tidak perlu didiskusikan. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri dan sifat ormas yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Meskipun pemerintah telah secara resmi membubarkan dan mencabut status badan hukum ormas HTI, secara organisatoris memang telah bubarkan atau organisasinya sudah tidak ada lagi. Karena sudah bubarkan maka struktur kepengurusan HTI yang sudah terbentuk dan tersusun rapi dari tingkat pusat ke daerah sudah tidak ada lagi. Akan tetapi secara ideologi politik dan gerakan dakwah yang mereka perjuangkan dalam menegakkan khilafah Islamiyah tetap berjalan seperti biasa. Ide dan cita-cita ideologi khilafah yang sudah disemai untuk diperjuangkan selama ini tidak akan pupus.

Sebagai organisasi yang pernah berjuang melalui gerakan bawah tanah pada masa orde baru, terutama pada tahun 1980-an seiring dengan masuknya HT ke Indonesia, tentu saja HTI memiliki pengalaman dalam memperjuangkan ideologi dan agenda tersembunyi yang mereka perjuangkan, yaitu khilafah Islamiyah. Memiliki pengalaman sebagai organisasi yang menjalankan dakwah atas nama politik dibawah rezim orde baru, HTI dinilai memiliki pengalaman yang memadai dalam menyusun strategi dan taktik dalam menyebarkan ideologinya. Pasca ditetapkan peraturan pemerintah dalam membubarkan HTI, akan memiliki pengaruh terhadap gerakan aktivitas gerakan dakwah yang mereka lakukan selama ini. Sebagai organisasi berbasis keagamaan HTI memiliki kader, pengikut, organisasi sayap kanan, simpatisan yang tersebar di beberapa kampus di Indonesia. Oleh karena itu, setelah organisasi induk besarnya dibubarkan apakah akan berpengaruh terhadap orientasi politik yang terdapat di kalangan kampus terutama dilingkungan Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang. Pasaunya dikedua kampus tersebut terdapat kader, simpatisan, dan para aktivis simpatisan terhadap kelompok HTI.

Di Lingkungan Universitas Andalas aktivitas HTI sebelum dibubarkan pemerintah, aktivitas muslimiah HT sangat aktif dalam menyebarkan dan menyemaikan gagasan khilafah. Hal ini terlihat dalam kegiatan mingguan yang biasa mereka lakukan

yaitu dengan mengadakan kelompok kajian diskusi, seputar, agama, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya dan menyebarkan leaflet dan bulletin Al-Islam setiap hari jumat di lingkungan Universitas Andalas. Setelah dibubarkan pemerintah, seperti apa orientasi politik yang mereka perjuangkan selama ini. Berdasarkan temuan dilapangan, semenjak dibubarkan pemerintah melalui Perpu, yang juga diikuti oleh putusan aturan edaran kebijakan-kebijakan Kementerian Ristek dan Teknologi terhadap larangan aktivitas dosen atau pun mahasiswa yang bergabung dalam HTI.

Dilingkungan mahasiswa Universitas Andalas, yang pernah aktif dan dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh HTI dan simpatisan HTI, tidak menyurutkan aktivitasnya dalam menggusung ideologi Khilafah yang mereka perjuangkan selama ini.

Menurut salah seorang aktivis simpatisan HTI dan terlibat dalam aneka kegiatan HT selama ini mengatakan

“Perbedaan orientasi politik sebelum dan sesudah dibubarkan hanya terletak pada nama dan platform organisasi yang jadikan sebagai payung kegiatan selama ini. Jika sebelum dibubarkan melakukan kegiatan atas nama HTI, setelah dibubarkan mereka tidak lagi menggunakan nama HTI”. Dilingkungan Universitas Andalas sendiri, aktivis Islam simpatisan HT selama ini, bertransformasi nama menjadi kelompok diskusi baru. Aktvitas dan gerakan dakwah yang biasa dilakukan selama ini, tidak ada yang perubahan yang signifikan.<sup>36</sup>

Menurut salah satu informan utama mengatakan: “Justru pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah semakin menguatkan solidaritas dan kolektivitas organisasinya. Mereka tetap memiliki pandangan ide dan cita-cita dalam menegakkan khilafah Islamiyah”.<sup>37</sup>

Sementara dilingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang orientasi politik aktivis simpatisan HTI yang tergabung dalam organisasi saya kanan mereka dalam lingkungan kampus dengan nama Gema Pembebasan, tetap melaksanakan aktivitas dan kegiatan organisasinya seperti biasa. Meskipun HT dibubarkan, akan tetapi Gema Pembebasan bukan ormas seperti HTI yang dilarang pemerintah melalui Perpu. Karena Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan untuk mencabut status badan hukum organisasi HT. Aktivis islami yang tergabung dalam gema pembebasan sesungguhnya memiliki semangat dan prinsip yang sama dengan organisasi induk mereka yaitu HTI. Kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Gema Pembebasan sama-sama ingin mencita-citakan dan mewujudkan khilafah islamiyah.



## Kesimpulan

Orientasi politik HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah terutama yang berasal dari kalangan islamis aktivis, kader, simpatisan HTI yang terdapat dilingkungan kampus. Pertama meskipun pemerintah telah secara resmi membubarkan dan mencabut status badan hukum organisasi HTI, kebijakan tersebut tidak menyurutkan cita-cita, ideologi, dan aktivitas organisasi mereka yaitu mendirikan khilafah Islamiyah. Kedua jika aktivitas organisasi yang mereka kedepankan selama ini atas nama HT, setelah dibubarkan mereka tidak lagi memakai nama HT dalam melaksanakan aktivitas dan gerakan dakwah, politik yang mereka lakukan. Ketiga bagaimanapun sebuah ideologi tidak mudah dihilangkan begitu saja. Apalagi ideologi tersebut diyakini sebagai sebuah keyakinan yang kuat. Keempat terdapat perubahan nama perubahan nama aktivitas, yang sebelum dibubarkan melaksanakan kegiatannya atas nama HTI, setelah dibubarkan berubah nama menjadi kelompok kajian diskusi. Di sisi lain yang terdapat di UIN Imam Bonjol Padang aktivitas yang mereka lakukan atas nama Gema Pembebasan, tetap melaksanakan kegiatannya seperti biasa.

## Catatan

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakati, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992).

<sup>2</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan Dan Administrasi)* (Jakarta: TIM HTI Press, 2006).

<sup>3</sup> Ken Ward, "Non-Violent Extremists ? Hizbut Tahrir Indonesia," *Australian Journal of International Affairs* Vol. 63, no. No.2 (2009), <https://doi.org/10.1080/10357710902895103>.

<sup>4</sup> Emmanuel Karagiannis and Clark M C Cauley, "Hizb Ut-Tahrir Al-Islami : Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group That Remains Nonviolent," in *Terrorism and Political Violence* (Routledge Taylor & Francis Group, 2006), 315–34, <https://doi.org/10.1080/09546550600570168>.

<sup>5</sup> Sudarno Shobron, "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia," *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* Vol. 15, no. No.1 (2014): 44–62.

<sup>6</sup> Burhanuddin Muhtadi, "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia," *Asian Journal of Social Science* Vol. 37, no. No. 4 (2019): 623–45, <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>.

<sup>7</sup> Ilyya Muhsin, "Gerakan Penegakan Syariah : Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia Di DIY," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 12, no. No. 1 (2012): 43–61.

<sup>8</sup> M.Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (Surabaya: Erlangga, 2010).

<sup>9</sup> Masdar Hilmy, "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.

<sup>10</sup> Houriya Ahmed dan Hannah Stuart, *Hizb Ut-Tahrir* (London: The Centre for Social Cohesion, 2009).

<sup>11</sup> Mohamed Nawab Mohamed Osman Source, "The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia," *South East Asia Research* Vol. 18, no. No. 4 (2019): 735–55, <https://doi.org/10.5367/sear.2010.0018>.

<sup>12</sup> Mohamed Nawab Mohamed Osman and S., "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia," *RSIS Working Paper* 171 (2009).

<sup>13</sup> Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living Al-Qur ' an Perspektif Komunikasi," *Epistemé* Vol.12, no. No.1 (2017): 169–200, <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>.

- <sup>14</sup> Tiffany Nadia Syifa, "Analisis Framing Pemberitaan Pemerintah Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Harian Kompas, Republika, Dan Media Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- <sup>15</sup> Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer Konsep, Ideologi, Teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012).
- <sup>16</sup> Abdul Qohar, "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum Dan Sesudah Pembubaran Cepet Tumbuh Berkembang Dan Sangat Jelas Menunjukkan Watak Secara Kuantitas . Gerakan Yang Didirikan Oleh Taqiyuddin an-," *KALAM* Vol. 11, no. No. 2 (2017): 365-96.
- <sup>17</sup> Diki Drajat, "Analisis Kebijakan Perpu Ormas: Kritik Terhadap Perpu No 2 Tahun 2017," n.d.
- <sup>18</sup> Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Democracy Project, 2001).
- <sup>19</sup> C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).
- <sup>20</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- <sup>21</sup> Harry J Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit (Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, n.d.).
- <sup>22</sup> AR Priyono, "Islam Politik Dan Masa Depan Islamisme," *Monograf* No 2 Juni (2019).
- <sup>23</sup> Ismail Usman, "Sarekat Islam (SI) Pembaharuan Politik Islam, Jurnal Potret:Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam," *Jurnal Potret:Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* Vol 21, no. No 1 Januari-Juni (2017).
- <sup>24</sup> Endang Muryanti, "Muncul Dan Pecahnya Sarekat Islam Di Semarang (1913-1920)," *Paramita* Vol 20, no. No 1 Januari (2010).
- <sup>25</sup> "No Title," n.d.
- <sup>26</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam,Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) Dan Partai Jama'at Islami (Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999).
- <sup>27</sup> Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*.
- <sup>28</sup> Sabar Sitanggang, "Pembubaran Masyumi, PSI Dan HTI:Kisah Pulu Di Hari Rabu," *Harian Umum Republika*, 2017.
- <sup>29</sup> Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: FREEDOM INSTITUTE, 2011).
- <sup>30</sup> Abdurrahman Wahid, ed., "Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia" (Jakarta: Wahid Institute, 2009).
- <sup>31</sup> Hizbut Tahrir, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009).
- <sup>32</sup> "https://www.nu.or.id/post/read/86255/buletin-Kaffah-Diduga-Milik-Hti-Masih-Menyebar-Di-Jombang," n.d.
- <sup>33</sup> Muhammad Haniffuddin, "Buletin Kaffah HTI Masih Tersebar Luas, Bagaimana Cara Menyikapinya?," n.d.
- <sup>34</sup> "Tentang Aksi Hizbut Tahrir Kota Padang, Dalam HTI Press Padang," n.d.
- <sup>35</sup> Tim Redaksi Hizbut Tahrir Indonesia, "Bukan Golput, Tapi Demokrasi Yang Beri Peluang Kafir Berkuasa," n.d.
- <sup>36</sup> Wawancara Dengan Simpatisan HTI, 2018.
- <sup>37</sup> Wawancara Dengan Simpatisan HTI, 2018.

## Daftar Pustaka

- Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: FREEDOM INSTITUTE, 2011.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit (Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, n.d.
- Dijk, C. Van. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Drajat, Diki. "Analisis Kebijakan Perpu Ormas: Kritik Terhadap Perpu No 2 Tahun 2017," n.d.
- Effendy, Bahtiar. *Islam Dan Negara Transformasi Gagasan Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Democracy Project, 2001.

- 
- Hanifuddin, Muhammad. "Buletin Kaffah HTI Masih Tersebar Luas, Bagaimana Cara Menyikapinya?," n.d.
- Hayati, Nilda. "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi." *Epistemé* Vol.12, no. No.1 (2017): 169–200. <https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200>.
- Hilmy, Masdar. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.
- "<https://www.nu.or.id/post/read/86255/buletin-Kaffah-Diduga-Milik-Hti-Masih-Menyebar-Di-Jombang>," n.d.
- Indonesia, Tim Redaksi Hizbut Tahrir. "“Bukan Golput, Tapi Demokrasi Yang Beri Peluang Kafir Berkuasa,”" n.d.
- Ismail Usman. "Sarekat Islam (SI) Pembaharuan Politik Islam, Jurnal Potret:Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam." *Jurnal Potret:Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* Vol 21, no. No 1 Januari-Juni (2017).
- Karagiannis, Emmanuel, and Clark M C Cauley. "Hizb Ut-Tahrir Al-Islami : Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group That Remains Nonviolent." In *Terrorism and Political Violence*, 315–34. Routledge Taylor & Fracis Group, 2006. <https://doi.org/10.1080/09546550600570168>.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam,Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) Dan Partai Jama'at Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Muhsin, Ilyya. "Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir Indonesia Di DIY." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 12, no. No. 1 (2012): 43–61.
- Muhtadi, Burhanuddin. "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* Vol. 37, no. No. 4 (2019): 623–45. <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>.
- Muryanti, Endang. "Muncul Dan Pecahnya Sarekat Islam Di Semarang (1913-1920)." *Paramita* Vol 20, no. No 1 Januari (2010).
- "No Title," n.d.

- 
- Noorhaidi Hasan. *Islam Politik Di Dunia Kontemporer Konsep, Ideologi, Teori*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed, and S. "Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia." *RSIS Working Paper* 171 (2009).
- Priyono, AR. "Islam Politik Dan Masa Depan Islamisme." *Monograf* No 2 Juni (2019).
- Qohar, Abdul. "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum Dan Sesudah Pembubaran Cepat Tumbuh Berkembang Dan Sangat Jelas Menunjukkan Watak Secara Kuantitas . Gerakan Yang Didirikan Oleh Taqiyuddin an-." *KALAM* Vol. 11, no. No. 2 (2017): 365–96.
- Rahmat, M.Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Surabaya: Erlangga, 2010.
- Shobron, Sudarno. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia." *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* Vol. 15, no. No.1 (2014): 44–62.
- Sitanggang, Sabar. "Pembubaran Masyumi, PSI Dan HTI:Kisah Pilu Di Hari Rabu." *Harian Umum Republika*. 2017.
- Source, Mohamed Nawab Mohamed Osman. "The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia." *South East Asia Research* Vol. 18, no. No. 4 (2019): 735–55. <https://doi.org/10.5367/sear.2010.0018>.
- Stuart, Houriya Ahmed dan Hannah. *Hizb Ut-Tahrir*. London: The Centre for Social Cohesion, 2009.
- Surbakati, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992.
- Syifa, Tiffany Nadia. "Analisis Framing Pemberitaan Pemerintah Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Harian Kompas, Republika, Dan Media Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Tahrir, Hizbut. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- . *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan Dan Administrasi)*. Jakarta: TIM HTI Press, 2006.
- "Tentang Aksi Hizbut Tahrir Kota Padang, Dalam HTI Press Padang," n.d.
- Wahid, Abdurrahman, ed. "Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia." Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Ward, Ken. "Non-Violent Extremists ? Hizbut Tahrir Indonesia." *Australian Journal of*

---

*International Affairs* Vol. 63, no. No.2 (2009).

<https://doi.org/10.1080/10357710902895103>.

“Wawancara Dengan Simpatisan HTI,” 2018.